

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengangguran ialah permasalahan ekonomi nan banyak terdapat di beberapa negara karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengangguran sangat bergantung dengan aktivitas ekonomi, ketika aktivitas ekonomi tinggi maka lebih banyak produksi terjadi secara keseluruhan, dan lebih banyak membutuhkan pekerja dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa dengan jumlah yang tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi rendah, perusahaan-perusahaan memangkas pekerjaan sehingga pengangguran meningkat. Dalam hal ini, pengangguran bersifat countercyclical, yaitu pengangguran akan meningkat ketika pertumbuhan ekonomi rendah dan sebaliknya (*International Monetary Fund*, n.d.).

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang dimana pengangguran masih menjadi permasalahan yang serius. Semenjak adanya pandemi hampir diseluruh negara mengalami masalah perekonomian seperti tidak terkecuali di Negara Indonesia (A. Putri & Azzahra, 2021). Ketidakseimbangan antara total pekerjaan yang ada dan total peserta angkatan kerja yang mencari pekerjaan di daerah tersebut dapat menyebabkan pengangguran di suatu negara. Dengan kata lain, orang yang mencari kerja lebih besar dari lapangan pekerjaan yang ada (Muslim, 2014). TPT menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ialah rasio digunakan untuk menghitung

persentase angkatan kerja yang tidak terabsorpsi oleh pasar tenaga kerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pasokan tenaga kerja tidak dimanfaatkan dengan baik dalam perekonomian. TPT memberikan gambaran tentang seberapa banyak individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan peluang kerja yang sesuai, menunjukkan kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. TPT Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen daripada dengan Agustus 2019. Berikut data TPT di Indonesia periode 2018-2023 :

Grafik 1.1 Presentase TPT di Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber : BPS data diolah (2024)

Berdasarkan grafik 1.1 memperlihatkan pengangguran di Indonesia tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif. Dari grafik menjelaskan bahwa tpt Indonesia tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini bisa terjadi karena terjadinya covid 19 yang berimbas kepada PHK karyawan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan karena ketidakstabilan ekonomi saat itu.

Pada tahun 2018-2019 presentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3% menjadi 5,23% sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,84% sehingga menjadi 7,07%. Selanjutnya pada tahun 2021-2023 menunjukkan penurunan secara berkala menjadi 6,49% pada tahun 2021, 5,86% pada tahun 2022 dan 5.32% pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti pengaruh pandemi Covid-19 yang berkurang, pengembangan ekonomi yang stabil, pengembangan industri, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 1.1 Presentase TPT di Indonesia Tahun 2018-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)						
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	6.34	6.17	6.59	6.30	6.17	6.03
SUMATERA UTARA	5.55	5.39	6.91	6.33	6.16	5.89
SUMATERA BARAT	5.66	5.38	6.88	6.52	6.28	5.94
RIAU	5.98	5.76	6.32	4.42	4.37	4.23
JAMBI	3.73	4.06	5.13	5.09	4.59	4.53
SUMATERA SELATAN	4.27	4.53	5.51	4.98	4.63	4.11
BENGKULU	3.35	3.26	4.07	3.65	3.59	3.42
LAMPUNG	4.04	4.03	4.67	4.69	4.52	4.23
KEP. BANGKA BELITUNG	3.61	3.58	5.25	5.03	4.77	4.56
KEP. RIAU	8.04	7.50	10.34	9.91	8.23	6.80
DKI JAKARTA	6.65	6.54	10.95	8.50	7.18	6.53
JAWA BARAT	8.23	8.04	10.46	9.82	8.31	7.44
JAWA TENGAH	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57	5.13
DI YOGYAKARTA	3.37	3.18	4.57	4.56	4.06	3.69
JAWA TIMUR	3.91	3.82	5.84	5.74	5.49	4.88
BANTEN	8.47	8.11	10.64	8.98	8.09	7.52
BALI	1.40	1.57	5.63	5.37	4.80	2.69
NUSA TENGGARA BARAT	3.58	3.28	4.22	3.01	2.89	2.80
NUSA TENGGARA TIMUR	2.85	3.14	4.28	3.77	3.54	3.14
KALIMANTAN BARAT	4.18	4.35	5.81	5.82	5.11	5.05
KALIMANTAN TENGAH	3.91	4.04	4.58	4.53	4.26	4.10
KALIMANTAN SELATAN	4.35	4.18	4.74	4.95	4.74	4.31
KALIMANTAN TIMUR	6.41	5.94	6.87	6.83	5.71	5.31
KALIMANTAN UTARA	5.11	4.49	4.97	4.58	4.33	4.01

SULAWESI UTARA	6.61	6.01	7.37	7.06	6.61	6.10
SULAWESI TENGAH	3.37	3.11	3.77	3.75	3.00	2.95
SULAWESI SELATAN	4.94	4.62	6.31	5.72	4.51	4.33
SULAWESI TENGGARA	3.19	3.52	4.58	3.92	3.36	3.15
GORONTALO	3.70	3.76	4.28	3.01	2.58	3.06
SULAWESI BARAT	3.01	2.98	3.32	3.13	2.34	2.27
MALUKU	6.95	6.69	7.57	6.93	6.88	6.31
MALUKU UTARA	4.63	4.81	5.15	4.71	3.98	4.31
PAPUA BARAT	6.45	6.43	6.80	5.84	5.37	5.38
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-
PAPUA	3.00	3.51	4.28	3.33	2.83	2.67
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan tpt semua provinsi di Indonesia selama periode 2018-2023. Dapat dilihat dari tabel bahwa pada tahun 2018 Jawa Barat menduduki sebagai provinsi dengan TPT tertinggi kedua sebesar 8.23%, pada tahun 2019 menduduki provinsi dengan TPT tertinggi kedua sebesar 8.04%, pada tahun 2020 menduduki provinsi dengan TPT tertinggi ketiga sebesar 10.46%, pada tahun 2021 menduduki provinsi dengan TPT tertinggi kedua sebesar 9.82%, pada tahun 2022 menduduki provinsi dengan TPT tertinggi pertama sebesar 8.31%, dan pada tahun 2023 menduduki provinsi dengan TPT tertinggi kedua sebesar 7.44%. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) timbul dikarenakan beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan permintaan pasar tenaga kerja, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta masalah struktural dalam perekonomian daerah. Berikut data tpt di Jawa Barat :

Grafik 1.2 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat 2018-2023



Sumber : BPS data diolah (2024)

Berdasarkan grafik 1.2 memperlihatkan tahun 2018-2023 tpt di Jawa Barat mendapati fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena beberapa berbagai determinan yang berkontribusi terhadap tpt di antaranya adalah TPAK, IPM, UMK, dan PDRB di Jawa Barat.

Tabel 1.2 TPAK Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	62.75	65.41	62.65	62.55	63.75	64.22
Sukabumi	62.71	62.65	61.56	64.93	69.11	67.75
Cianjur	60.22	66.00	69.26	67.98	69.98	72.31
Bandung	61.79	65.32	62.20	65.12	63.64	67.10
Garut	60.06	62.6	61.11	62.76	68.84	70.10
Tasikmalaya	64.07	66.46	69.54	68.18	67.83	68.37
Ciamis	66.67	67.39	71.41	69.83	68.47	66.26
Kuningan	58.53	61.20	61.98	63.82	61.80	61.95
Cirebon	61.75	65.23	63.79	64.49	65.53	66.16
Majalengka	65.64	67.83	69.66	67.63	66.21	68.50
Sumedang	61.93	63.9	68.96	68.51	64.63	67.76

Indramayu	64.88	67.69	69.53	69.86	69.08	63.88
Subang	64.35	67.67	66.70	67.78	68.87	70.03
Purwakarta	63.12	63.88	60.91	61.13	65.21	66.37
Karawang	64.77	63.57	64.90	64.19	65.51	63.40
Bekasi	61.43	64.02	64.23	65.87	65.41	65.00
Bandung Barat	61.26	61.97	59.91	60.75	64.37	67.01
Pangandaran	77.74	75.08	76.79	74.75	79.92	80.15
Kota Bogor	63.11	63.68	60.81	61.77	64.21	64.81
Kota Sukabumi	59.62	62.48	55.74	56.86	62.48	62.57
Kota Bandung	61.86	65.90	64.71	65.31	69.42	66.97
Kota Cirebon	67.89	62.71	63.76	62.87	65.42	68.71
Kota Bekasi	65.23	65.66	64.74	64.76	65.33	64.65
Kota Depok	62.51	64.96	63.96	62.62	63.35	62.76
Kota Cimahi	64.40	63.26	62.67	61.79	67.22	68.43
Kota Tasikmalaya	62.63	65.26	66.54	65.75	65.99	65.44
Kota Banjar	64.93	67.59	67.35	64.07	63.76	67.44

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Persentase penduduk yang bekerja dan berusia di atas 15 tahun dikenal sebagai TPAK, menurut BPS. Presentase penduduk usia kerja suatu negara yang bekerja ditunjukkan oleh nilai TPAK. Dalam sebuah perekonomian, jumlah tenaga kerja yang ada guna menciptakan barang dan jasa semakin banyak seiring dengan peningkatan nilai TPAK. Dilihat dari tabel 1.2 menggambarkan bahwa TPAK tertinggi di provinsi Jawa Barat selama periode 2018-2023 berturut-turut adalah Kabupaten Pangandaran dengan nilai TPAK sebesar 77,74% pada tahun 2018, 75,08% pada tahun 2019, 76,79% pada tahun 2020, 74,75% pada tahun 2021, 79,92% pada tahun 2022, dan 80,15% pada tahun 2023. Sedangkan TPAK terendah adalah Kabupaten Kuningan pada tahun 2018-2019 sebesar 58,53% dan 61,20%, pada tahun 2020-2021 TPAK terendah adalah Kota Sukabumi dengan nilai sebesar 55,74% dan 56,86%, dan pada tahun 2022-2023 TPAK terendah kembali kepada Kabupaten Kuningan dengan nilai sebesar 61,8% dan 61,95%. Selama periode 6

tahun ini cenderung mendapati pertambahan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 menurun hal ini dapat terjadi karena imbas terjadinya pandemi covid.

Tabel 1.3 IPM Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2023

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	69.69	70.65	70.40	70.60	71.20	71.78
Sukabumi	66.05	66.87	66.88	67.07	67.64	68.49
Cianjur	64.62	65.38	65.36	65.56	65.94	66.55
Bandung	71.75	72.41	72.39	72.73	73.16	73.74
Garut	65.42	66.22	66.12	66.45	67.41	68.11
Tasikmalaya	65.00	65.64	65.67	65.90	66.84	67.76
Ciamis	69.63	70.39	70.49	70.93	71.45	72.05
Kuningan	68.55	69.12	69.38	69.71	70.16	70.72
Cirebon	68.05	68.69	68.75	69.12	70.06	70.95
Majalengka	66.72	67.52	67.59	67.81	68.56	69.13
Sumedang	70.99	71.46	71.64	71.80	72.69	73.18
Indramayu	66.36	66.97	67.29	67.64	68.55	69.25
Subang	68.31	68.69	68.95	69.13	69.87	70.70
Purwakarta	69.98	70.67	70.82	70.98	71.56	72.09
Karawang	69.89	70.86	70.66	70.94	71.74	72.35
Bekasi	73.49	73.99	74.07	74.45	75.22	75.76
Bandung Barat	67.46	68.27	68.08	68.29	69.04	69.61
Pangandaran	67.44	68.21	68.06	68.28	69.03	69.38
Kota Bogor	75.66	76.23	76.11	76.59	77.17	77.85
Kota Sukabumi	73.55	74.31	74.21	74.6	75.40	76.32
Kota Bandung	81.06	81.62	81.51	81.96	82.50	83.04
Kota Cirebon	74.35	74.92	74.89	75.25	75.89	76.46
Kota Bekasi	81.04	81.59	81.5	81.95	82.46	83.03
Kota Depok	80.29	80.82	80.97	81.37	81.86	82.38
Kota Cimahi	77.56	78.11	77.83	78.06	78.77	79.46
Kota Tasikmalaya	72.03	72.84	73.04	73.31	73.83	74.47
Kota Banjar	71.25	71.75	71.70	71.92	72.55	73.08

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Menurut Lailatul Qamariyah et al., (2022) salah satu faktor yang bisa mengurangi tpt adalah IPM. IPM bisa dipakai sebagai dimensi guna mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas penduduk. Dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPM dari tahun ke tahun di 18 kabupaten dan 9 kota

provinsi Jawa Barat. IPM tertinggi selama 6 tahun terakhir diraih oleh Kota Bandung dengan nilai 81,06%, 81,62%, 81,51%, 81,96%, 82,50%, dan 83,04%. Sedangkan IPM terendah berada pada Kabupaten Cianjur selama 6 tahun terakhir yaitu dengan nilai 64,62%, 65,38%, IPM mengandung 3 aspek dasar yaitu angka harapan hidup, lama sekolah dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, dengan meningkatnya IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga mengalami peningkatan sehingga tingkat pendapatan pun akan meningkat juga, begitupun sebaliknya jika IPM rendah maka tingkat produksi dan tingkat pendapatan pun juga rendah (Yoertiara & Feriyanto, 2022).

Tabel 1.4 UMK Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2023

Wilayah Jawa Barat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	3,204,551	3,483,667	3,763,406	4,083,670	4,217,206	4,520,212
Sukabumi	2,376,558	2,583,557	2,791,016	3,028,532	3,125,445	3,351,883
Cianjur	1,989,115	2,162,367	2,336,005	2,534,799	2,699,814	2,893,229
Bandung	2,463,461	2,678,029	2,893,075	3,139,275	3,241,930	3,492,466
Garut	1,538,909	1,672,948	1,807,286	1,961,086	1,975,221	2,117,318
Tasikmalaya	1,767,030	1,920,938	2,075,189	2,251,788	2,326,772	2,499,954
Ciamis	1,475,793	1,604,334	1,733,162	1,880,655	1,897,867	2,021,657
Kuningan	1,477,353	1,606,030	1,734,994	1,882,642	1,908,102	2,010,734
Cirebon	1,723,578	1,873,702	2,024,160	2,196,416	2,279,983	2,430,781
Majalengka	1,525,632	1,658,515	1,791,693	1,944,166	2,027,619	2,180,603
Sumedang	2,463,461	2,678,029	2,893,075	3,139,275	3,241,930	3,471,134
Indramayu	1,803,239	1,960,301	2,117,714	2,297,931	2,391,567	2,541,997

Subang	2,327,072	2,529,760	2,732,900	2,965,468	3,064,218	3,273,811
Purwakarta	3,169,549	3,445,617	3,722,300	4,039,068	4,173,569	4,464,675
Karawang	3,605,272	3,919,291	4,234,010	4,594,325	4,798,312	5,176,179
Bekasi	3,530,438	3,837,940	4,146,126	4,498,962	4,791,844	5,137,575
Bandung Barat	2,468,289	2,683,277	2,898,745	3,145,428	3,248,283	3,480,795
Pangandaran	1,433,901	1,558,794	1,714,673	1,860,591	1,884,364	2,018,389
Kota Bogor	3,272,143	3,557,147	3,842,786	4,169,807	4,330,250	4,639,429
Kota Sukabumi	1,985,494	2,158,431	2,331,753	2,530,183	2,562,434	2,893,229
Kota Bandung	2,843,663	3,091,346	3,339,581	3,623,779	3,774,861	4,048,463
Kota Cirebon	1,741,683	1,893,384	2,045,422	2,219,488	2,304,944	2,456,517
Kota Bekasi	3,601,650	3,915,354	4,229,757	4,589,709	4,816,921	5,158,248
Kota Depok	3,297,489	3,584,700	3,872,552	4,202,106	4,377,232	4,694,494
Kota Cimahi	2,463,461	2,678,028	2,893,074	3,139,275	3,272,669	3,514,093
Kota Tasikmalaya	1,776,686	1,931,435	2,086,530	2,264,093	2,363,390	2,533,341
Kota Banjar	1,437,522	1,562,730	1,688,218	1,831,885	1,852,100	1,998,119

Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah (2024)

Upah minimum adalah jumlah yang diharapkan dibayar oleh pemberi kerja atau pelaku industri lainnya kepada karyawan di suatu bisnis atau tempat kerja (E. M. Putri & Putri, 2021). Upah minimum perlu ditetapkan supaya menjadi batas paling sedikit bagi perusahaan dalam menentukan jumlah upah terhadap pekerjanya. UMK merupakan standar terkecil upah bagi tenaga kerja di suatu

wilayah Kabupaten/Kota. Jumlah tenaga kerja di suatu negara dipengaruhi oleh upah, ketika suatu wilayah memiliki upah minimum yang tinggi tawaran upah yang tinggi membuat angkatan kerja lebih tertarik untuk mencari pekerjaan (Silvia & Wildan, 2023). Dari tabel 1.4 menjelaskan UMK tertinggi selama 6 tahun terakhir terdapat di Kabupaten Karawang yaitu sebesar Rp 3.605.272 juta pada tahun 2018, Rp 3.919.291 juta pada tahun 2019, Rp 4.234.010 juta pada tahun 2020, Rp 4.594.325 juta pada tahun 2021, pada tahun 2022 UMK tertinggi di wilayah Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921 juta dan pada tahun 2023 UMK tertinggi terdapat di Kabupaten Karawang sebesar Rp. 5.176.179 juta rupiah. Sedangkan UMK terendah tahun 2018-2019 terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu sebesar Rp 1.433.901 juta dan Rp 1.558.794 juta, pada tahun 2020-2024 UMK terendah terdapat di Kota Banjar yaitu sebesar Rp 1.688.218 juta pada tahun 2020, Rp 1.831.885 juta pada tahun 2021, Rp 1.852.100 juta pada tahun 2022, dan Rp 1.998.119 juta rupiah pada tahun 2023.

Tabel 1.5 PDRB Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2023

Wilayah Jawa Barat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	148,203	156,876	154,114	159,590	167,966	176,684
Sukabumi	44,141	46,628	46,205	47,936	50,389	52,994
Cianjur	30,320	32,039	31,792	32,898	34,556	36,340
Bandung	77,613	82,547	81,061	83,949	88,438	92,830
Garut	37,225	39,092	38,598	39,981	42,013	44,087
Tasikmalaya	23,321	24,587	24,345	25,179	26,362	27,599
Ciamis	20,879	22,001	21,970	22,775	23,919	25,112

Kuningan	15,822	16,864	16,883	17,484	18,450	19,419
Cirebon	32,162	33,668	33,304	34,128	35,524	37,247
Majalengka	20,007	21,562	21,755	22,789	24,301	25,793
Sumedang	22,508	23,933	23,665	24,415	25,642	26,877
Indramayu	58,288	60,153	59,200	59,545	61,260	67,238
Subang	27,408	28,673	28,344	28,961	30,182	31,605
Purwakarta	44,342	46,278	45,293	46,840	49,293	51,741
Karawang	157,318	163,947	157,711	166,941	177,471	187,052
Bekasi	241,949	251,503	242,971	251,779	265,131	279,225
Bandung Barat	29,889	31,398	30,640	31,702	33,393	35,062
Pangandaran	7,309	7,743	7,739	8,023	8,426	8,870
Kota Bogor	30,414	32,296	32,163	33,372	35,259	37,055
Kota Sukabumi	8,210	8,664	8,535	8,851	9,324	9,802
Kota Bandung	185,084	197,643	193,145	200,414	211,249	221,969
Kota Cirebon	15,817	16,812	16,648	17,156	18,030	18,934
Kota Bekasi	65,845	69,407	67,619	69,797	73,261	77,242
Kota Depok	45,979	49,077	48,136	49,947	52,565	55,222
Kota Cimahi	21,193	22,856	22,341	23,276	24,653	25,932
Kota Tasikmalaya	14,859	15,746	15,430	15,981	16,781	17,782
Kota Banjar	3,067	3,221	3,252	3,365	3,506	3,679

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Menurut BPS, PDRB merujuk pada keseluruhan nilai tambah yang dibuat melalui semua unit produksi, baik yang memproduksi barang maupun jasa, pada suatu wilayah tertentu. PDRB berdasarkan harga berlaku (nominal) mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonominya (Ayu, 2018). Dari tabel 1.5 di atas menggambarkan PDRB tertinggi di Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 241.949 milyar pada tahun 2018, Rp 251.503 milyar pada tahun 2019, Rp 242.971 milyar pada tahun 2020, Rp 251.779 milyar pada tahun 2021, Rp 265.131 milyar pada tahun 2022, dan Rp 279.225 milyar pada tahun 2023. Sedangkan PDRB terendah terdapat di Kota Banjar dengan nilai Rp 3.067 milyar pada tahun 2018, Rp 3.221 milyar pada tahun 2019, Rp 3.252 milyar pada tahun 2020, Rp 3.365 milyar pada tahun 2021, Rp 3.506 milyar pada tahun 2022 dan Rp 3.679 milyar pada tahun 2023. Mengingat bahwa PDRB dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi memiliki perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Penelitian ini dilakukan dengan memilih semua wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak diantara provinsi lain di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka akan meningkatkan persaingan kerja yang ketat yang dapat meningkatkan potensi terjadinya pengangguran. Dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, tingkat pengangguran di Jawa Barat telah menunjukkan angka yang tinggi. Selama rentang waktu tersebut, Jawa Barat konsisten berada di peringkat tiga besar provinsi dengan nilai tpt tertinggi di Indonesia dan dipilih tahun 2018-2023 untuk melihat bagaimana kondisi tpt sebelum adanya pandemi covid, saat terjadi pandemi covid,

dan sesudah adanya pandemi covid. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah guna melihat apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tpt di Provinsi Jawa Barat. Novelty dari penelitian ini yaitu meneliti tingkat pengangguran dengan lebih mendalam dan spesifik di provinsi Jawa Barat dan metode penelitian yang dipakai adalah Seemingly Unrelated Regression (SUR). Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana TPAK memengaruhi TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023?
2. Bagaimana IPM memengaruhi TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023?
3. Bagaimana UMK memengaruhi TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023?
4. Bagaimana PDRB memengaruhi TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh TPAK terhadap TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh UMK terhadap TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap TPT di Kabupaten/Kota Jawa Barat periode 2018-2023.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berperan sebagai landasan bagi pihak pemerintah dalam proses pengambilan keputusan guna menangani permasalahan pengangguran di wilayah Jawa Barat.
2. Diharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain serta diharapkan mampu menyediakan wawasan terkait perihal persoalan ekonomi yang ada di wilayah Jawa Barat bagi masyarakat.